

LAMPIRAN III.1
TATARAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Keselarasan dan Efektivitas Hubungan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintah, serta antara Pemerintahan Daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah	Penyampaian laporan keuangan dan kinerja	10	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan berdasarkan PP 8/2006	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman : - Laporan Keuangan 2017, disampaikan pada tanggal—2018 sesuai surat pengantar Nomor— tanggal—2018	Tepat/tidak	
			11	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan berdasarkan PP 8/2006	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman : - Laporan Kinerja tahun 2017, disampaikan pada tanggal 5 Januari 2018	Tepat	
3	Keselarasan antara Kebijakan Pemerintahan Daerah dengan Kebijakan Pemerintah		15	Urusan wajib yang diselenggarakan daerah	Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 24 (jumlah Urusan wajib di UU 23/2014) x 100%	Urusan wajib yang dilaksanakan pada tahun 2017 (APBD) = 20 urusan	66,67%	
			16	Waktu penetapan PERDA APBD 2017	Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2017	Apabila TEPAT : Sebutkan dasar hukumnya PERDA Nomor : 09 Tahun 2016 tentang APBD Kabupaten Pesisir Selatan 2017	Tepat	Tidak tepat, apabila APBD ditetapkan setelah 31 Desember 2017
			17	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah	Apabila ADA : Sebutkan legal formalnya PERDA Nomor : 09 Tahun 2008 tentang Pedoman pengela keuangan daerah	Ada	

		Keuangan	18	Belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi jumlah total belanja x 100%	Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2017. 1. Urusan Pendidikan Rp 583.355.274.721 2. Urusan Kesehatan Rp 220.408.400.965 3. Urusan PU dan Penataan Ruang Rp 272.531.196.978 4. Urusan Perumahan Rakyat & kawasan pemukiman Rp 30.064.699.964 5. Urusan Trantitubum dan Linmas Rp 23.902.018.341 6. Urusan Sosial Rp 6.576.605.877 Total Belanja pelayanan dasar Rp 1.136.838.196.846 Total Belanja APBD 2017, sebesar Rp 1.683.678.202.919	67,53%	
			19	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi jumlah total belanja x 100%	Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2017. 1. Urusan Pendidikan Rp 583.355.274.721 2. Urusan Kesehatan Rp 220.408.400.965 Total Belanja Pend & Kes Rp 803.763.675.686 total Belanja APBD 2017, sebesar Rp 1.683.678.202.919	47,75%	
9	Transparansi Dalam Pemanfaatan Alokas, Pencairan dan Penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil	Serapan dana perimbangan	32	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%	Dana perimbangan yang terserap tahun 2017 sebesar Rp. 1.109.254.189.839 Dana Perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD tahun 2017 sebesar Rp. 1.130.054.483.211	98,16%	
		Alokasi Belanja pada APBD dari DAU	33	Belanja Publik terhadap DAU	Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%	- Belanja langsung APBD tahun 2017, sebesar Rp 752.819.672.011,50 - DAU Tahun 2017, sebesar Rp 838.100.134.000	89,82%	
		Alokasi Belanja pada APBD	34	Belanja Langsung terhadap total APBD	Total belanja langsung dibagi APBD x 100%	- Total Belanja langsung APBD tahun 2017, sebesar Rp 752.819.672.011,50 - Total Belanja APBD Tahun 2017, sebesar Rp 1.683.678.202.919	44,71%	
10	Intensitas, Efektivitas dan Transparansi Pemungutan Sumber-sumber PAD dan Pinjaman/Obligasi Daerah	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	35	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (Realisasi)	Jumlah PAD dibagi jumlah total pendapatan APBD (realisasi) x 100%	- PAD APBD (Realisasi) tahun 2017, sebesar Rp. 19.937.421.953,02 - Total pendapatan dalam APBD (Realisasi) tahun 2017, sebesar Rp. 16.858.676.122	118,26%	

11	Efektivitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggungjawaban dan Pengawasan APBD	Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)	36	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Jenis Opini BPK terhadap hasil Lapkeu daerah untuk 2 (dua) tahun terakhir	- Laporan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2016, dengan opini : WTP - Laporan hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2017, dengan opini : -	Opini tahun 2016 = WTP Opini tahun 2017 = -	
		Besaran SILPA	37	Rasio SILPA terhadap total pendapatan	Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%	- SILPA Tahun 2017, sebesar Rp. 4.260.544.254,02 - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2017, sebesar Rp. 19.937.421.953,02	21,37%	
		Realisasi Belanja	38	Rasio realisasi PAD 2017 terhadap potensi PAD	Realisasi belanja dibagi total anggaran elanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Tahun 2017, sebesar Rp. 9.344.908.495 - Total Anggaran belanja dalam APBD Tahun 2017, sebesar Rp. 10.603.822.966	88,13%	Realisasi Belanja disesuaikan dengan LRA
12	Pengelola Potensi Daerah	Peta Potensi Daerah	40	Rasio realisasi PAD 2017 terhadap potensi PAD	Jumlah realisasi PAD 2017 dibagi dengan potensi PAD x 100%	- Realisasi PAD tahun 2017, sebesar Rp----- Potensi PAD pada APBD tahun 2017 APBD		
		Peningkatan PAD	41	Peningkatan PAD	Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100% (PAD 2017 - PAD 2016) : PAD 2016 X 100%	- Total PAD pada tahun 2017 sebesar Rp----- - Total PAD pada tahun 2016 sebesar Rp ---		
13	Terobosan/Inovasi Baru Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penghargaan	42	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2017	Jumlah Penghargaan dari Pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam tahun 2017	Penghargaan yang diterima, sebanyak 1 yang terdiri dari: WTP	1 Penghargaan	

LAMPIRAN III.1
TATARAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

No (1)	ASPEK (2)	FOKUS (3)	No (4)	IKK (5)	RUMUS/PERHITUNGAN (6)	Jenis Data (Tahun 2017) (7)	Capaian Kinerja (8)	Keterangan (9)
2	Keselaran dan efektivitas Hubungan Antara Pemerintahan Serta Antar Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Pengembangan Otonomi Daerah	Hubungan antar daerah	13	Kerjasama dengan daerah lain atau pihak lain	Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2017	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2017, sebanyak 1 MOU yang terdiri dari : 1. MOU dengan Bank Pembangunan Daerah tentang kerjasama layanan Perbankan dalam Penyaluran Dana Nagari	1 MOU	
13	Terobosan /Inovasi Baru Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penghargaan	42	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2017	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah daerah dalam tahun 2017	Penghargaan yang diterima, sebanyak (1) yang terdiri dari : Piagam WTP tahun 2016	1 Penghargaan	

LAMPIRAN III.2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBUJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

KABUPATEN : PESIR SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
1. URUSAN KEUANGAN
2. URUSAN PERTANAHAN

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan (1) Keuangan	Urusan (2) Pertanahan	Urusan Keuangan	Urusan Pertanahan
1	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh perangkat Daerah dibagi jumlah Program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak— program - Jumlah program Nasional yang dilaksanakan perangkat daerah, sebanyak 7 program	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak— program - Jumlah program Nasional yang dilaksanakan perangkat daerah, sebanyak 1 program		
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen/LPND	2	Keberadaan standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila ada, Sebutkan ada banyak yang terdiri dari : SOP ttg 1. prosedur kenaikan gaji berkala, 2. surat keluar, 3. surat masuk, 4. nota dinas, 5. pengadaan barang inventaris, 6. pemakaian barang, 7. pengajuan perawatan peralatan, 8. penertiban aset, 9. penghapusan aset, 10. penyampaian realisasi fisik kegiatan dan keuangan perbulan, 11. penyusunan LAKIP, 12. penyusunan LKPI, 13. penyusunan LPPD, 14. penyusunan RKA, 15. renstra, 16. pengentrian data keuangan pada SIPKD, 17. pembayaran gaji pegawai, 18. pembayaran dana UP, GU, TU, 19. tunjangan daerah, 20. pencairan GU, 21. pencairan dana kegiatan langsung (LS), 22. pencairan dana TU, 23. pencairan UP, 24. penyusunan analisa standart belanja, 25. penyusunan PERDA APBD dan PERBUP tentang penjabaran APBD, 26. penyusunan PERDA perubahan APBD dan PERBUP tentang perubahan penjabaran APBD, 27. penyusunan anggaran hibah, 28. penerbitan SP2D UP/GU/TU/LS/LS barang /jasa, 29. penata usahaan kas daerah, 30. surat rekomendasi, 31. pengelolaan dan penatausahaan gaji, 32. pengadministrasian kendaraan dinas, 33. standart satuan harga, 34. manajemen aset daerah, 35. sertifikasi tanah hak milik pemerintah daerah, 36. rekonsiliasi data keuangan	Apabila ada, Sebutkan ada banyak yang terdiri dari : SOP ttg 1. prosedur kenaikan gaji berkala, 2. surat keluar, 3. surat masuk, 4. nota dinas, 5. pengadaan barang inventaris, 6. pemakaian barang, 7. pengajuan perawatan peralatan, 8. penertiban aset, 9. penghapusan aset, 10. penyampaian realisasi fisik kegiatan dan keuangan perbulan, 11. penyusunan LAKIP, 12. penyusunan LKPI, 13. penyusunan LPPD, 14. penyusunan RKA, 15. renstra, 16. pengentrian data keuangan pada SIPKD, 17. pembayaran gaji pegawai, 18. pembayaran dana UP, GU, TU, 19. tunjangan daerah, 20. pencairan GU, 21. pencairan dana kegiatan langsung (LS), 22. pencairan dana TU, 23. pencairan UP, 24. penyusunan analisa standart belanja, 25. penyusunan PERDA APBD dan PERBUP tentang penjabaran APBD, 26. penyusunan PERDA perubahan APBD dan PERBUP tentang perubahan penjabaran APBD, 27. penyusunan anggaran hibah, 28. penerbitan SP2D UP/GU/TU/LS/LS barang /jasa, 29. penata usahaan kas daerah, 30. surat rekomendasi, 31. pengelolaan dan penatausahaan gaji, 32. pengadministrasian kendaraan dinas, 33. standart satuan harga, 34. manajemen aset daerah, 35. sertifikasi tanah hak milik pemerintah daerah, 36. rekonsiliasi data keuangan	Ada 36 SOP	Ada 36 SOP
2	Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN) tentang SPM	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN tentang SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak NIHIL PERDA yang seharusnya, sebanyak NIHIL	- PERDA pelaksanaan sebanyak NIHIL PERDA yang seharusnya, sebanyak NIHIL	0%	0%

3	Penataan Kelembagaan Daerah	Pengisian Struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 16 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 16	- Jabatan yang ada sebanyak 16 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 16	100%	100%
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat daerah	Apabila ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional tidak ada	Apabila ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional tidak ada	tidak ada	tidak ada
4	Pengelolaan Kepegawain Daerah	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (1), sebanyak 34 Personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 7168 personil	- PNS yang menangani urusan (1), sebanyak 4 Personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 7168 personil	34 Personil	4 personil
			7	rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 6 org - Pejabat yang ada sebanyak 16 org	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 6 org - Pejabat yang ada sebanyak 16 org	37,50%	37,50%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org - Jabatan yang ada sebanyak 16 pejabat	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org - Jabatan yang ada sebanyak 16 pejabat	56,25%	56,25%
5	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat daerah, - RKA-Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis yang terdiri dari : RENJA, RENSTRA, RKA	Apabila ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis yang terdiri dari : RENJA, RENSTRA, RKA	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA PD dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah program RKPD ang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 10 program - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 10 program	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 10 program - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 10 program	100%	100%

	Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. -Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program	- Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. -Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program	100%	100%	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program	- Jumlah program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program	100%	100%	
6	Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi Anggaran	13	Realisasi belanja Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Realisasi belanja perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Realisasi Perangkat Daerah, sebesar Rp. 9.019.618.480,- - Total belanja APBD, sebesar Rp. 10.173.270.436,-	- Total Realisasi Perangkat Daerah, sebesar Rp. 171.626.515,- - Total belanja APBD, sebesar Rp. 239.022.530,-	88,66%	71,80%
	Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah(realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 4.481.319.310,- - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 9.019.618.480,-	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0,- - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 171.626.515,-	49,68%	0,00%	
	Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa perangkat daerah x 100%	- Total belanja pemeliharaan perangkat daerah sebesar Rp. 84.005.156,- - Total Belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 3.031.135.014,-	- Total belanja pemeliharaan perangkat daerah sebesar Rp. 0,- - Total Belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 171.626.515,-	2,77%	0,00%	
		16	Total belanja pemeliharaan dari total belanja perangkat daerah(realisasi)	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 84.005.156,- - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 9.019.618.480,-	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 0,- - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 171.626.515,-	0,93%	0,00%	
	Laporan Keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, laporan keuangan ada sebanyak 5 jenis, sbb : NERACA, LRA, LPE, LO, CALK	Apabila Ada, laporan keuangan ada sebanyak 5 jenis, sbb : NERACA, LRA, LPE, LO, CALK	ada sebanyak 5 jenis	ada sebanyak 5 jenis	
7	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Manajemen Asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan Inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila ada, sebutkan jenis dokumennya : KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)	Apabila ada, sebutkan jenis dokumennya : KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)	Ada	Ada

	Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100%	- Asset yang tidak digunakan sebesar Rp----- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah , sebesar Rp-----	- Asset yang tidak digunakan sebesar Rp----- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah , sebesar Rp-----	-----%	-----%
8. Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat	Bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas/prasarana Informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas/prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya: 1. Papan Pengumuman 2. Leaflet 3. Resepsionis	Sebutkan jenisnya: 1. Papan Pengumuman 2. Leaflet 3. Resepsionis	Jumlah sebanyak 3 jenis	Jumlah sebanyak 3 jenis
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang (tidak ada)	Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang (tidak ada)	tidak ada	tidak ada

LAMPIRAN III.2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

KABUPATEN : PESISIR SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
3. URUSAN PARIWISATA
4. URUSAN INSPEKTORAT

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan (1) Pariwisata	Urusan (2) Inspektorat	Urusan Pariwisata	Urusan Inspektorat
1	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh perangkat Daerah dibagi jumlah Program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak— program - Jumlah program Nasional yang dilaksanakan perangkat daerah, sebanyak 1 program	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak— program - Jumlah program Nasional yang dilaksanakan perangkat daerah, sebanyak 1 program		
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen/LPND	2	Keberadaan standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila ada, Sebutkan ada banyak yang terdiri dari : SOP ttg 1. prosedur kenaikan gaji berkala, 2. surat keluar, 3. surat masuk, 4. nota dinas, 5. pengadaan barang inventaris, 6. pemakaian barang, 7. pengajuan perawatan peralatan, 8.penerbitan aset, 9. penghapusan aset, 10. penyampaian realisasi fisik kegiatan dan keuangan perbulan, 11. penyusunan LAKIP, 12. penyusunan LKPI, 13. penyusunan LPPD, 14. penyusunan RKA, 15.renstra, 16. pengentrian data keuangan pada SIPKD, 17. pembayaran gaji pegawai, 18. pembayaran dana UP, GU, TU, 19. tunjangan daerah, 20. pencairan GU, 21. pencairan dana kegiatan langsung(LS), 22. pencairan dana TU, 23. pencairan UP, 24. penyusunan analisa standart belanja, 25. penyusunan PERDA APBD dan PERBUP tentang penjabaran APBD, 26. penyusunan PERDA perubahan APBD dan PERBUP tentang perubahan penjabaran APBD, 27. penyusunan anggaran hibah, 28. penerbitan SP2D UP/GU/TU/LS/LS barang /jasa, 29. penata usahaan kas daerah, 30. surat rekomendasi, 31. pengelolaan dan penatausahaan gaji, 32. pengadministrasian kendaraan dinas, 33. standart satuan harga, 34. manajemen aset daerah, 35. sertifikasi tanah hak milik pemerintah daerah, 36. rekonsiliasi data keuangan	Apabila ada, Sebutkan ada banyak yang terdiri dari : SOP ttg 1. prosedur kenaikan gaji berkala, 2. surat keluar, 3. surat masuk, 4. nota dinas, 5. pengadaan barang inventaris, 6. pemakaian barang, 7. pengajuan perawatan peralatan, 8.penerbitan aset, 9. penghapusan aset, 10. penyampaian realisasi fisik kegiatan dan keuangan perbulan, 11. penyusunan LAKIP, 12. penyusunan LKPI, 13. penyusunan LPPD, 14. penyusunan RKA, 15.renstra, 16. pengentrian data keuangan pada SIPKD, 17. pembayaran gaji pegawai, 18. pembayaran dana UP, GU, TU, 19. tunjangan daerah, 20. pencairan GU, 21. pencairan dana kegiatan langsung(LS), 22. pencairan dana TU, 23. pencairan UP, 24. penyusunan analisa standart belanja, 25. penyusunan PERDA APBD dan PERBUP tentang penjabaran APBD, 26. penyusunan PERDA perubahan APBD dan PERBUP tentang perubahan penjabaran APBD, 27. penyusunan anggaran hibah, 28. penerbitan SP2D UP/GU/TU/LS/LS barang /jasa, 29. penata usahaan kas daerah, 30. surat rekomendasi, 31. pengelolaan dan penatausahaan gaji, 32. pengadministrasian kendaraan dinas, 33. standart satuan harga, 34. manajemen aset daerah, 35. sertifikasi tanah hak milik pemerintah daerah, 36. rekonsiliasi data keuangan	Ada 36 SOP	Ada 36 SOP
2	Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN) tentang SPM	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN tentang SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak NIHIL PERDA yang seharusnya, sebanyak NIHIL	- PERDA pelaksanaan sebanyak NIHIL PERDA yang seharusnya, sebanyak NIHIL	0%	0%

3	Penataan Kelembagaan Daerah	Pengisian Struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 16 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 16	- Jabatan yang ada sebanyak 16 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 16	100%	100%
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat daerah	Apabila ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional tidak ada	Apabila ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional tidak ada	tidak ada	tidak ada
4	Pengelolaan Kepegawaian Daerah	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (1), sebanyak 1 Personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 7168 personil	- PNS yang menangani urusan (1), sebanyak 12 Personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 7168 personil	1 Personil	12 personil
			7	rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 6 org - Pejabat yang ada sebanyak 16 org	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 6 org - Pejabat yang ada sebanyak 16 org	37,50%	37,50%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org - Jabatan yang ada sebanyak 16 pejabat	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org - Jabatan yang ada sebanyak 16 pejabat	56,25%	56,25%
5	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat daerah, - RKA-Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis yang terdiri dari : RENJA, RENSTRA, RKA	Apabila ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis yang terdiri dari : RENJA, RENSTRA, RKA	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA PD dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 10 program - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 10 program	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 10 program - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 10 program	100%	100%

		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program	- Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program	100%	100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program	- Jumlah program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program	100%	100%
6	Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi Anggaran	13	Realisasi belanja Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Realisasi belanja perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Realisasi Perangkat Daerah, sebesar Rp. 14.802.291,- - Total belanja APBD, sebesar Rp. 15.000.000,-	- Total Realisasi Perangkat Daerah, sebesar Rp. 138.861.209,- - Total belanja APBD, sebesar Rp. 176.530.000,-	98,68%	78,66%
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0,- - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 14.802.291,-	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0,- - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 138.861.209,-	0,00%	0,00%
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa perangkat daerah x 100%	- Total belanja pemeliharaan perangkat daerah sebesar Rp. 0,- - Total Belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 11.802.291,-	- Total belanja pemeliharaan perangkat daerah sebesar Rp. 0,- - Total Belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 74.061.209,-	0,00%	0,00%
			16	Total belanja pemeliharaan dari total belanja perangkat daerah (realisasi)	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 0,- - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 14.802.291,-	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 0,- - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 138.861.209,-	0,00%	0,00%
		Laporan Keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, laporan keuangan ada sebanyak 5 jenis, sbb : NERACA, LRA, LPE, LO, CALK	Apabila Ada, laporan keuangan ada sebanyak 5 jenis, sbb : NERACA, LRA, LPE, LO, CALK	ada sebanyak 5 jenis	ada sebanyak 5 jenis
7	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Manajemen Asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila ada, sebutkan jenis dokumennya : KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)	Apabila ada, sebutkan jenis dokumennya : KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)	Ada	Ada

		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100%	-Asset yang tidak digunakan sebesar Rp— - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah , sebesar Rp—	-Asset yang tidak digunakan sebesar Rp— - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah , sebesar Rp—	—%	—%
8	Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat	Bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas/prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas/prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya: 1. Papan Pengumuman 2. Leaflet 3. Resepsionis	Sebutkan jenisnya: 1. Papan Pengumuman 2. Leaflet 3. Resepsionis	Jumlah sebanyak 3 jenis	Jumlah sebanyak 3 jenis
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang (tidak ada)	Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang (tidak ada)	tidak ada	tidak ada

SDM Pendukung Program dan Kegiatan:

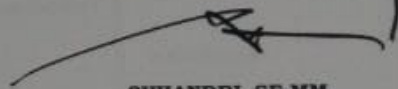
DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PER 31 DESEMBER 2017

No.	Nama/NIP	Kualifikasi Pendidikan terakhir					Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Pelatihan Struktural (Diklat PIM)			
		SD/ SETB	SLTA	DIII	SI	S2	LK	PR	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	ESSELON II.b															
1.	SUHANDRI, SE.MM 19700608 200212 1 003	-	-	-	-	v	v	-	-	-	-	v	-	-	v	v
	ESSELON III.a															
2.	WELDI, S.Sos, MM 19641028 199003 1 004	-	-	-	-	v	v	-	-	-	-	v	-	-	v	v
	ESSELON III.b															
3.	SUBCHANDRI, SE, Msi 19720416 199903 1 003	-	-	-	-	v	v	-	-	-		v	-	-	v	v
4.	MULYANI, SE 19680628 199303 2 005	-	-	-	v	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	v
5.	HELEN H. SARI, SE.AK.M.Ec.Dev 19780528 200501 2 004	-	-	-	v	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	v
	ESSELON IV.a															
6.	WILLY SUSPARELA, SE 19790404 200312 2 005	-	-	-	v	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-
7.	IRNAWATI, SE 19830112 201001 2 022	-	-	-	v	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-
8.	DESMARNI 19610905 198603 2 003	-	v	-	-	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-
9.	YULI ASTUTI, SPT 19780712 200701 2 007	-	-	-	v	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-
10.	ROSZA LESTARI, SE 19780920 200701 2 007	-	-	-	v	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-
11.	SUSMIYAR DERITA, A.Md 19720111 200312 2 002	-	-	v	-	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-
12.	LUSIANA, S.Kom, MM 19810406 200902 2005	-	-	-	-	v	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-

No.	Nama/NIP	Kualifikasi Pendidikan terakhir					Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Peningkatan Struktural (Tingkat PMS)			
		SD/SLTP	SLTA	DIP	SI	S2	LK	PR	I	II	III	IV	I	II	III	IV
13.	FITRI HANDAYANI, A.Md 19810803 200501 2 006	-	-	v	-	-	-	V	-	-	v	-	-	-	-	-
14.	EMRI, SH 19640605 199308 1 001	-	-	-	v	-	v	-	-	-	V	-	-	-	-	V
15.	RENI DAHLIA, SE 19730130 200701 2 004	-	-	-	v	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-
16.	INTAN NOVIA F NANDA, SE, Ak, MPP, MAP 19841111 200902 2 008	-	-	-	-	v	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-
STAF																
17.	HALIFAH MARYENTI, SE 19800913 201407 2 004	-	-	-	v	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-
18.	RIO PRATAMA, A.Md 19870420 201101 1 004	-	-	v	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-	-
19.	SUBCHAN KHALID 19800429 200501 1 007	-	v	-	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-	-
20.	EFRIANTO 19840712 200701 1 003	-	v	-	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-	-
21.	REVI MARTA 19841005 200801 1 001	-	v	-	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-	-
22.	DASMANELI 19820915 201001 2 025	-	v	-	-	-	-	V	-	v	-	-	-	-	-	-
23.	AGUS SOFIAN 19830808 201001 1 012	-	v	-	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-	-
24.	DESTI FAJRIANI 19851207 201001 2 029	-	v	-	-	-	-	V	-	v	-	-	-	-	-	-
25.	MARTIO 19840303 201001 1 022	-	v	-	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-	-
26.	AFRIZAL 19850421 201001 1 026	-	v	-	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-	-
27.	MELI ETRI YENI, SE 19750718 200701 2 006	-	-	-	v	-	-	V	-	-	v	-	-	-	-	-
28.	RANI MEIRINA, S 19850524 200501 2 002	-	v	-	-	-	-	V	-	v	-	-	-	-	-	-
29.	RIYANTI 19830605 200701 2 002	-	v	-	-	-	-	V	-	v	-	-	-	-	-	-
30.	ZULMARITA RAHMA, SE 19860911 200602 2 001	-	-	-	v	-	-	V	-	-	v	-	-	-	-	-
31.	MUHAMMAD ZAKI. E. M.M, SE 19821030 201502 1 002	-	-	-	v	-	v	-	-	-	v	-	-	-	-	-
32.	SUPARDI 19680824 200604 1 001	-	v	-	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-	-

No.	Nama/NIP	Kualifikasi Pendidikan terakhir					Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Pelatihan Struktural (Diklat PIM)			
		SD/ SLTP	SLTA	DIII	S1	S2	LK	PR	I	II	III	IV	I	II	III	IV
33.	ASWENRIZAL 19760116 200801 1 007	-	v	-	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-	-
34.	RATIH NOFA YANI 19851123 201001 2 030	-	v	-	-	-	-	V	-	v	-	-	-	-	-	-
Total		-	14	3	11	6	14	20	-	14	17	3	-	-	3	6

Painan, Januari 2018
 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN PESISIR SELATAN


SUHANDRI, SE.MM
 NIP. 19700608 200212 1 003